POHON KINERJA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KEBUMEN

GAMBARAN UMUM

1. INFORMASI

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengampu 2 (dua) Urusan yaitu Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Urusan Pekerjaan Umum) dan Urusan Pilihan (Pertanahan), untuk tujuan jangka menengah urusan pekerjaan umum adalah pendukung pencapaaian tujuan RPJMD yaitu Mewujudkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan dengan indikator Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah dengan capaian awal tahun 2021 sebesar 51,86 dengan target capaian pada akhir RPJMD di tahun 2026 yaitu 70,69. dan untuk urusan pertanahan dalah pendukung dalam mencapaiaan tujuan Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian awal tahun 2021 sebesar 82,5 dengan prospek pada akhir perencanaan pada tahun 2026 kondisi yang diharapkan mendapatkan nilai atau indeks kepuasan masyarakat sebesar 86.

Sedangkan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Meningkatnya Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah dengan indikator Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum dengan capaian awal tahun 2021 sebesar 51.86 dengan target capaian pada akhir RPJMD di tahun 2026 yaitu 65,89. Dan Terselesaikan nya kasus sengketa lahan dengan indikator Persentase Penanganan Sengketa Lahan dengan taget capaian awal tahun 2021 sebesar 100 % dengan target capaian pada akhir RPJMD di tahun 2026 yaitu 100 %

2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen, antara lain :

1. Tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik

   Mendasari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka Pemerintah Kabupaten Kebumen harus mengawal dan selaras dengan kebijakan nasional sehingga pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel serta pelayanan masyarakat yang cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dapat terwujud sebagaimana tujuan dari reformasi birokrasi. Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik telah dilakukan, namun masih banyak kendala dalam pelaksanaannya seperti terkait mindset budaya kinerja, untuk itu perlu persamaan persepsi pimpinan dan

kebijakan yang berkelanjutan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

2. Kualitas Pelayanan Pekerjaan Umum Yang Optimal

Infrastruktur pekerjaan umum merupakan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan aksesibilitas, konektivitas, maupun sarana dan prasarana penunjang. Hal ini menjadi bagian dari Tuntutan Penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan dan tepat waktu di era digital saat ini semakin meningkat. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dituntut selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat akan kesiapan infrastruktur pekerjaan umum. Penanganan keluhan dan pengaduan masyarakat yang cepat menjadi sangat penting. Hal ini akan berdampak positif terhadap pemerintah serta dapat menimbulkan kepercayaan dari masyarakat kepada Penyelenggara Pelayanan Publik. Secara umum kondisi pelayanan pekerjaan umum masih butuh perbaikan hal ini disebabkan Banyaknya beban infrastruktur yang harus ditangani tidak sebanding dengan ketersediaan sumber daya dan anggaran yang dimiliki. Oleh karena itu sangat perlu dilakukan koordinasi dan pembahasan perencanaan yang baik secara teknis dan pembiayaan sesuai skala prioritas. Rencana pembangunan infrastruktur harus dikomunikasikan dengan baik dengan masyarakat agar dapat tepat sasaran, menimbulkan rasa memiliki dan meningkatkan peran serta aktif masyarakat. Selain itu, infrastruktur yang sudah ada, juga harus dirawat dengan baik agar dapat digunakan untuk kepentingan umum dengan lebih optimal.

3. POHON KINERJA

3.1. Hasil (*outcome*) yang akan dijabarkan dalam penjenjangan Kinerja

3.1.1 Meningkatnya Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah

Dengan ningkatnya Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah diharapkan mampu Mewujudkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan.

3.1.2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik terkait penanganan sengketa lahan

Dengan meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik terkait penanganan sengketa lahan diharapkan akan membantu Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

3.2. Identifikasi Faktor Kunci Keberhasilan (*Critical Success Factor*/CSF)

Ultimate Oucome	Outcome	CSF (Intermediete Outcome)
Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Meningkatnya Persentase Infrastuktur Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik	Meningkatnya Kualitas Kinerja penampungan air baku buatan atau Embung
		Meningkatnya kualitas kinerja irigasi skunder
	Meningkatnya Persentase Pelayanan Air Bersih Perpipaan	Meningkatnya kualitas kinerja SPAM untuk pemenuhan pelayanan air bersih perpipaan
	Meningkatnya Persentase Jalan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	Meningkatnya kualitas kinerja jalan dan jembatan kewenangan kabupaten
	Meningkatnya Persentase Saluran Drainase dalam Kondisi Baik	Meningkatnya kualitas kinerja drainase kewenangan kabupaten
	Meningkatnya Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	Meningkatnya Kondisi bangunan gedung pemerintah
	Meningkatnya Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Tertangani	Meningkatnya Kondisi Bangunan dan lingkungan di wilayah Kabupaten
	Meningkatnya Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Telah Dibina dan Nilainya Baik	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi yang telah mendapatkan pembinaan
	Meningkatnya Persentase Kesesuaian Lahan dengan Pola Ruang RTRW	Meningkatnya kesesuaian lahan dengan pola RTRW
Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Persentase Penanganan Sengketa Lahan	Meningkatnya fasilitasi penanganan sengketa lahan

3.3. Menguraikan Faktor Kunci Keberhasilan (CSF) Kepada Kondisi Antara Sampai Kondisi Paling Operasional

CSF	KONDISI YANG DIPERLUKAN
Meningkatnya Kualitas Kinerja penampungan air baku buatan atau Embung	Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan konservasi SDA
Meningkatnya kualitas kinerja irigasi skunder	Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan irigasi Skunder
Meningkatnya kualitas kinerja SPAM untuk pemenuhan pelayanan air bersih perpipaan	Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan Jaringan SPAM
Meningkatnya kualitas kinerja jalan dan jembatan kewenangan kabupaten	Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kewenangan Kabupaten
Meningkatnya kualitas kinerja drainase kewenangan kabupaten	Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan Saluran Drainase Kewenanagan Kabupaten
Meningkatnya Kondisi bangunan gedung pemerintah	Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan bangunan Gedung Pemerintah
Meningkatnya Kondisi Bangunan dan lingkungan di wilayah Kabupaten	Terlaksananya Penyaluran semen untuk stimulant pembangunan lingkungan
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi yang telah mendapatkan pembinaan	Terlaksananya pelatihan tenaga terampil konstruksi
Meningkatnya kesesuaian lahan dengan pola RTRW	Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan dokumen pendukung kesesuain lahan dengan pola RTRW
Meningkatnya fasilitasi penanganan sengketa lahan	Terlaksananya fasilitasi penanganan sengketa lahan

Adapun Pohon Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada diagram berikut:

POHON KINERJA

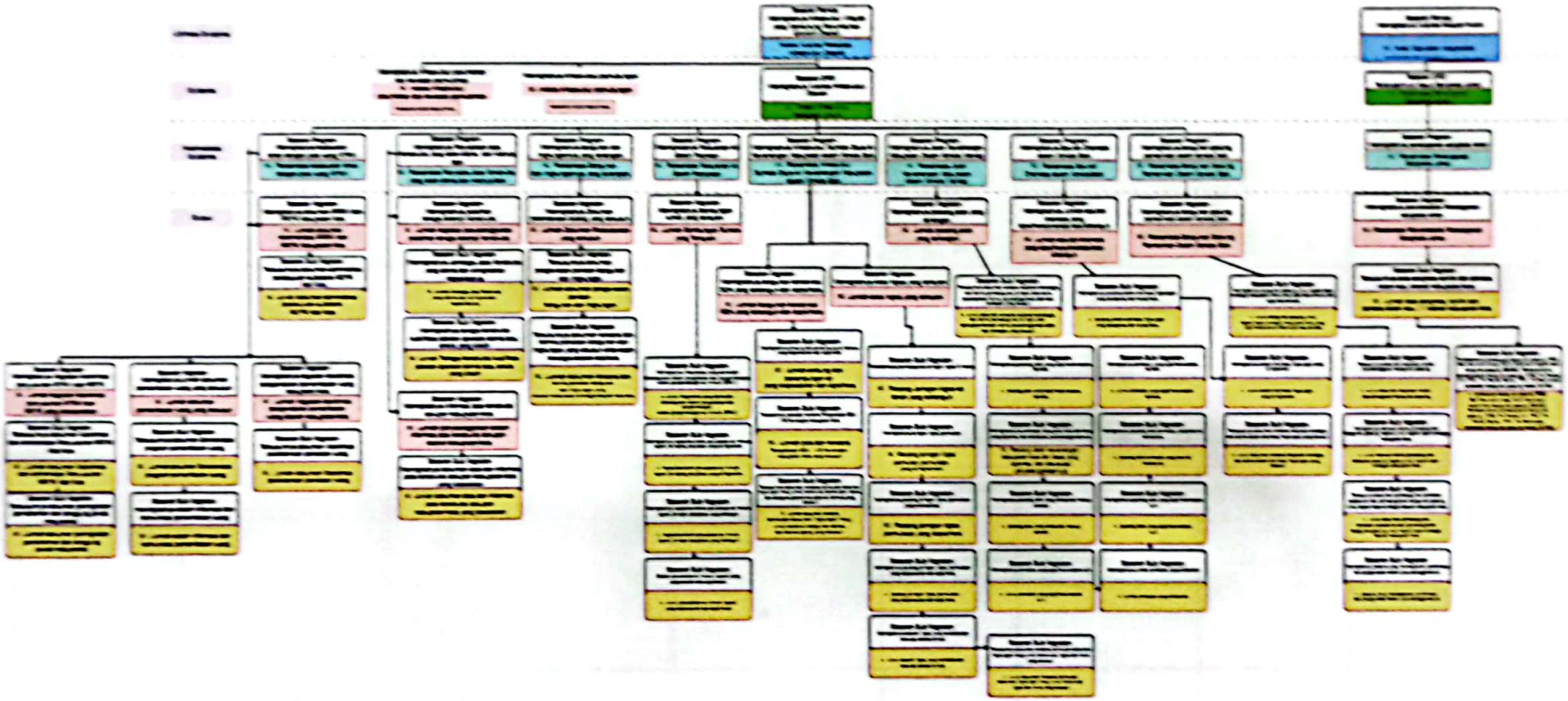

3.4. Merumuskan Indikator Kinerja

Ultimate Outcome	Outcome	Intermedieto Outcome	Output (Kondisi yang diperlukan)	Indikator Kinerja
Meningkatnya Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah				Indeks Kualitas Pekerjaan Infrastruktur Daerah
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah			Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum
		Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik		Persentase Infrastuktur Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik
			Meningkatnya bangunan konservasi SDA yang terbangun dan terpelihara	Jumlah bangunan konservasi SDA yang terbangun dan terpelihara
			Meningkatnya Areal irigasi yang terlayani	Jumlah areal irigasi yang terlayani
		Meningkatnya Jalan Kewenangan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap		Persentase Jalan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap
			Meningkatnya panjang jalan yang tertangani	Jumlah panjang jalan yang tertangani
		Meningkatnya Saluran Drainase dalam Kondisi Baik		Persentase Saluran Drainase dalam Kondisi Baik

			Meningkatnya Jumlah saluran drainase yang dipelihara/ direhabilitasi/ dibangun	Jumlah saluran drainase yang dipelihara/ direhabilitasi/ dibangun
		Meningkatnya bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik		Persentase Bangunan Gedung Pemerintah Dalam Kondisi Baik
			Meningkatnya bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah Dalam Kondisi Baik
		Meningkatanya Pelayanan Air Bersih Perpiaan		Persentase Pelayanan Air Bersih Perpipaa
			Meningkatnya Sambungan rumah yang terlayani	Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani
		Meningkatnya bangunan dan lingkungannya yang tertangani		Persentase Bangunan dan lingkungannya yang tertangani
			Meningkatnya Dokumen perencanaan bidang yang tersusun	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun
		Meningkatnya Penyediaan jasa konstruksi yang telah dibina dan nilainya baik		Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang telah dibina dan nilainya baik

			Meningkatnya pelatihan tenaga terampil konstruksi	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi
			Meningkatnya informasi jasa konstruksi cakupan kabupaten/ kota	umlah penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota
		Meningkatnya kesesuaian lahan dengan pola ruang RTRW		Persentase kesesuaian lahan dengan pola ruang RTRW
			Meningkatnya dokumen RRRW dan RRTR Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen rekomendasi RRRW dan RRTR Kabupaten/Kota
			Meningkatnya jumlah dokumen pemanfaatan ruang yang tersusun	Jumlah dokumen pemanfaatan ruang yang tersusun
			Meningkatnya kegiatan koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten/ kota	Jumlah Kegiatan koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota
Meningkatnya Kualitas Pelayan Publik				Indek Kepuasan Masyarakat
	Tertanganinya Kasus Sengketa Lahan			Persentase Penanganan Sengketa Lahan

		Meningkatnya penanganan sengketa lahan		ersentase Penanganan Sengketa Laha
			Meningkatnya penyelesaian Penanganan sengketa lahan	Persentase Penyelesaian Penanganan Sengketa Lahan

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KEBUMEN

JONI HERNAWAN, ST., MT.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700728 199803 1 006